

PROSES KOORDINASI TERHADAP KELANCARAN PENYELESAIAN SKB PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT MEDAN SELATAN

*(Studi Implementasi Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lintas Kepada Provinsi di Kabupaten/Kota)*

TESIS



OLEH :

**BUDI ILYAS
NPM : 061801050**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 8**

**PROSES KOORDINASI TERHADAP KELANCARAN
PENYELESAIAN SKB PADA KANTOR BERSAMA
SAMSAT MEDAN SELATAN**

*(Studi Implementasi Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lintas Kepada Provinsi di Kabupaten/Kota)*

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

BUDI ILYAS

NPM : 061801050

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2008

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PROSES KOORDINASI TERHADAP KELANCARAN
PENYELESAIAN SKB PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT
MEDAN SELATAN (*Studi Implementasi Berdasarkan UU No. 14*
tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah
Dalam Bidang Lintas Kepada Provinsi di Kabupaten/Kota)

NAMA : BUDI ILYAS

NIM : 061801050

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Heri Kusmanto, MA


Drs. Usman Tarigan MS

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik

Direktur


Drs. Kariono, MA


Drs. Heri Kusmanto, MA



Telah Diuji Pada Tanggal 05 Agustus 2008



Panitia Penguji Tesis:

Ketua : Drs. Kariono, MA

Sekretaris : Drs. Warjio, MA

Pembimbing I : Drs. Heri Kusmanto, MA

Pembimbing II : Drs. Usman Tarigan, MS

Penguji Tamu : Drs. Murbanto Sinaga, MA

ABSTRAK

N a m a : Budi Ilyas
Nomor Mahasiswa : 061801050
Pembimbing I : Drs. Heri Kusmanto, MA
Pembimbing II : Drs. Usman Tarigan, MS
Judul : PROSES KOORDINASI TERHADAP KELANCARAN PENYELESAIAN SKB PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT MEDAN SELATAN (*Studi Implementasi Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lintas Kepada Provinsi di Kabupaten/Kota*)

SAMSAT dibentuk berdasarkan 3 (tiga) keputusan bersama antara Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Ketiga instansi tersebut kemudian mendelegasikan tugasnya kepada dinas-dinas dibawahnya untuk menangani tugas-tugas yang bersifat operasional di lapangan sekaligus melakukan koordinasi.

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan kejadian pada masa sekarang kepada masa yang akan datang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, obsevasi dan study kepustakaan, sedangkan proses analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan data kemudian dipisah-pisah menurut kategori untuk kemudian diambil suatu kesimpulannya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, dalam melaksanakan tugas operasional SAMSAT Medan Selatan berada di bawah koordinasi 3 instansi yang dilimpahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri, Kepolisian oleh Menhamkam, Jasa Raharja oleh Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan tugas-tugas SAMSAT pelayanan kepada publik dilakukan dengan sistem satu atap, sehingga proses penyelesaian Surat Kendaraan Bermotor dapat diwujudkan dengan sistem pelayanan yang lebih cepat. Walaupun masih terdapat kelemahan, akan tetapi sistem pelayanan sudah mengalami perbaikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam hal ini dapat dikemukakan kesimpulan bahwa, proses koordinasi tugas-tugas SAMSAT oleh 3 departemen sudah berjalan dengan baik. Sistem pelayanan publik sesuai dengan jadwal penyelesaian pekerjaan belum seluruhnya dapat diwujudkan, demikian juga dengan kehadiran calo yang menawarkan jasanya untuk membantu publik mengurus kepentingan terkadang memberi kesan memaksa, sehingga publik yang berkepentingan dengan SAMSAT kurang nyaman.

Kata Kunci:

1. Koordinasi
2. SKB
3. Samsat Medan Selatan

KATA PENGANTAR

Assalamualaiukum, Wr.Wb.

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang diberi judul yaitu, *Proses Koordinasi Terhadap kelancaran Penyelesaian PKB pada Kantor Bersama Samsat Medan Selatan (Studi Implementasi Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Lintas kepada Provinsi di Kabupaten/Kota)*. Selanjutnya salawat beriring salam penulis haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan tesis ini banyak ditemukan kendala, namun berkat bimbingan yang disampaikan bapak Drs. Heri Kusmanto MA selaku pembimbing I dan bapak Drs. Usman Tarigan, MS selaku Pembimbing II akhirnya penulisan tesis ini dapat dirampungkan. Untuk itu penulis menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya, semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda H. Raja Aman Harahap, Ibunda Hj. Nur Akmal Azizah Siregar, Abanghanda H. Yuslin Siregar, Kakanda Erni Wati Harahap, Ellys Mayanti Harahap yang tiada hentinya memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini. Demikian juga kepada personil Samsat Medan Selatan, Ketua Program MAP-UMA, Staf pengajar MAP UMA, keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan dukungan, penulis sampaikan terima kasih.

Penulis sangat menyadari kekurangan yang terdapat dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, kiranya tesis ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan pembaca.

Medan, 25 Maret 2008
Penulis

Budi Ilyas

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Konsep Implementasi Kebijakan	9
2.2. Teori dan Model Implementasi	11
2.3. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan.....	18
2.4. Pengambilan Keputusan.....	19
2.5. Administrasi dan manajemen pelayanan publik	23
2.6. Aspek-aspek koordinasi	28
2.7. Aspek Kelancaran penyelesaian Surat Kendaraan Bermotor.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1. Fokus Penelitian.....	40
3.2. Lokasi penelitian	40

3.3. Populasi dan teknik pengambilan sampel	40
3.4. Teknik pengumpulan data	41
3.5. Teknik analisis data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1. Sejarah pembentukan UU No. 14 tahun 1992.....	43
4.2. Eksistensi Kantor Bersama Samsat.....	49
4.3. PKB dan BBN-KB	53
4.4. Proses Koordinasi pada Samsat	57
4.5. Faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi.....	61
BAB V PENUTUP.....	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran-saran.....	66
DAFTAR KEPUSTAKAAN.	

DAFTAR TABEL

Tabel :

1. Kepala UPT/Samsat Medan Selatan Dari Tahun 1987 – 2008	48
2. Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan PKB dan BBNKB Samsat Medan Selatan Tahun 2002-2007	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1. Durasi waktu penyelesaian Layanan Pada Samsat Medan Selatan Pada tahun 2008.
2. Target dan realisasi penyelesaian pelayanan Samsat Medan Selatan dari Tahun 2007-2008.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Administrasi Publik dewasa ini baik di negara maju maupun di negara berkembang mengarah pada peningkatan efisiensi dan profesionalisme. Berbagai kegiatan yang bergerak dalam ruang lingkup administrasi publik semakin tertata dengan baik, rasional, efisien dan dinamis. Pada era reformasi ini, desakan ke arah peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat ditunda lagi, pemerintah baik pusat maupun daerah terus mempersiapkan konsep pelayanan yang berkualitas dan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Walaupun pemerintah dengan berbagai aparat-aparat birokrasinya sudah berbenah diri dan melakukan perbaikan dalam berbagai sektor, dalam kenyataannya pelayanan kepada masyarakat masih sangat memprihatinkan, baik dari segi kecepatan, ketertiban, keramah tamahan, ketelitian, kesungguhan, tanggung jawab maupun dari segi kualitasnya.

Salah satu organisasi atau instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan publik adalah Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Kantor Bersama SAMSAT). Instansi ini mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Sumbangan Wajib Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dalam kaitannya dengan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Pada dasarnya SAMSAT dibentuk berdasarkan 3 (tiga) keputusan bersama antara Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI (No. Pol Kep.13/XII/1976), Menteri Keuangan (No. Kep. 1963/MK/IV/1976) dan Menteri Dalam Negeri (No. 331 Tahun 1976). Ketiga instansi pemerintah tersebut kemudian mendelegasikan tugasnya kepada dinas-dinas dibawahnya untuk menangani tugas-tugas yang bersifat operasional di lapangan.

Dalam hal ini Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata mendelegasikan tugasnya kepada Polisi Republik Indonesia (POLRI), Menteri Keuangan mendelegasikan kepada PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja sedangkan Menteri Dalam Negeri mendelegasikannya kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi yang masing-masing membuka cabang pada daerah Kabupaten atau Kota.

Dengan demikian, implementasi tugas di lapangan dilakukan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) instansi sebagaimana sistem dan fungsinya yaitu:

1. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara mengemban tugas memungut PKB dan BBN-KB.
2. Kepolisian Republik Indonesia Provinsi Sumut bertugas memberi pelayanan registrasi dan identifikasi, bukti pemilikan kendaraan bermotor (BPKB), STNK dan PNKB.
3. Perum Asuransi Kerugian Jasa Raharja bertugas untuk melakukan pemungutan SWDKLLJ.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahab, Sholihin. 1990. *Analisis Kebijakan Negara*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Ichsan, Muhammad. 1998. *Pengembangan Administrasi Sebagai Disiplin Ilmu dan Profesi*. Makalah Seminar Persadi Jakarta.
- Kartasmita, Ginanjar. 1998. *Visi Pembangunan 2018 Tantangan Bagi Profesi Administrasi*. Makalah Seminar Persadi, Jakarta.
- Kasim, Azhar. 1998. *Perkembangan Studi Administrasi Sebagai Disiplin Ilmu dan Profesi*. Makalah Seminar Persadi, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mufis, Ali. 1986. *Buku Materi Pokok PLANE*. Karunika. Jakarta
- Pfiffner, John M. and Presthus. 1960. *Public Administration*. New York: The Ronald Press.
- Sugandha, Daan. 1994. *Strategi Penetapan UUD 1945 Dalam Administrasi Negara Guna Memberikan Pelayanan yang Prima*. Makalah Seminar Dies Natalis LAN, Bandung.
- Sutarto. 1995. *Dasar-Dasar Organisasi*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Stoner, James AF. Dan R. Edward Freeman. 1992. *Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- , 1991. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- , 1997. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Bumi Akasara, Jakarta.
- Zainun, Buchary. 1979. *Manajemen dan Motivasi*. Balai Aksara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992, *Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas Kepada Provinsi di Kabupaten/Kota*

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah.*

